**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Ajaran yang menyatakan “berikan raja apa yang menjadi haknya dan gereja apa yang merupakan haknya” bisa dipahami sebagai fakta bahwa kuatnya pengaruh kedua institusi di atas. Demi agama seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya. Demikian pula tidak jarang demi negara, seseorang tidak keberatan mengorbankan jiwa dan raganya. Konsep syahid dalam ajaran Islam dan konsep pahlawan yang berkaitan dengan negara adalah cermin betapa dua institusi tersebut sama-sama mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap kehidupan umat manusia.[[1]](#footnote-2)

Salah satu perkembangan pemahaman yang sampai saat ini terjadi topik hangat adalah penegasan dari sebuah konsepsi mengenai sistem politik Islam, yakni pencarian tentang konsep negara. Masalah ini kian makin komplek karena tatkala konsep negara bangsa (*nation state)* yang berasal dari barat berpengaruh dipraktekkan dalam lingkungan Islam.

Lahirlah pemikir-pemikir Islam yang mencoba mencari solusi dengan mencoba mengungkapkan ide-ide pembaharuan, termasuk pembaharuan di bidang politik yang mengaitkan Islam dan negara.

Jika dicermati, terdapat tiga aliran yang berpendapat dalam mengaitkan Islam dan negara, yaitu: (1) Mereka yang berpendirian bahwa Islam itu adalah Agama yang sempurna dan paripurna, sehingga dapat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan bernegara. Tokoh yang berpendapat seperti ini adalah: Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, Abu A’la al-Maududi. (2) Mereka yang berpendapat bahwa Islam itu tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan seperti Ali Abd-Raziq dan Thaha Husein. (3) Orang yang berpendapat bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap dengan perangkat tata-nilai kehidupan bernegara tetapi tidak memuat bagaimana sistem ketatanegaraan baik dalam al-Quran atau Hadits, ini dikemukakan oleh Dr. Mohammad Husein Haikal.[[2]](#footnote-3)

Berkaitan dengan hal itu, Nurcholish Madjid yang merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan dalam dunia politik Islam di Indonesia, menyuarakan seruan bahwa negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif, sedangkanagama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual.[[3]](#footnote-4) Oleh karena itu,baginya masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban bahkan tidak menjadi integral dariIslam.

Sebagaimana dipertegas dalam pidatonya berjudul “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” pada 3 Januari 1970 di Gedung Pertemuan *Islamic Research Center*, Menteng Raya, Jakarta dan disampaikan lagi pada bulan Oktober 1972 di Taman Ismail Marzuki (TIM). Sejak itulah sekularisasi dan liberalisasi Islam di Indonesia bergulir. Semakin hari, semakin tinggi intensitasnya dengan kualitas yang semakin berat.[[4]](#footnote-5)

Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, Nurcholish Madjid lebih banyak berkaca pada pemikiran para pemikir teologis filosofis barat sehingga pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung liberal dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Latar belakang inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti Pemikiran Politik Nurcholish Madjid mengenai keterkaitan Islam dan Negara, untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang di kemukakan oleh pemikir politik Islam tersebut.

Peneliti memilih Nurcholish Madjid sebagai fokus kajian karena isu-isu pemikirannya yang monoteistik radikal, kemoderenan, dan selalu berpegang kepada prinsip “*Mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”.[[5]](#footnote-6)*

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Pemikiran Politik Nurcholish Madjid tentang keterkaitan antara Islam dan Negara ?”

1. **Defenisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan sebagai berikut:

1. Menurut Harun Nasution Islam sebagai agama yang ajaran-ajaran agamanya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.[[6]](#footnote-7) Senada dengan itu, defenisi Islam atau *takrif* istilah yang dipakai oleh Hafidz Abdurrahman dalam bukunya Islam Politik dan Spiritual mengatakan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesama manusia.[[7]](#footnote-8)
2. Negara atau ‘*state’* berasal dari bahasa Latin *status* (*stato* dalam bahasa Itali, *etat* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa Inggris) yang artinya menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan. Negara atau negeri dalam Bahasa Indonesia yakni wilayah yang memiliki kedaulatan dan pemerintah(an).[[8]](#footnote-9) Menurut Ziya Gokalp, “negara berarti suatu otoritas publik yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukumnya atas individu-individu yang keselamatannya berada di bawah naungan (negara itu)". [[9]](#footnote-10)
3. Pemikiran politik adalah semacam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu masyarakat politik.[[10]](#footnote-11) Dapat pula diartikan pemikiran politik adalah sebuah konsepsi, gagasan, ide yang lahir dari akal pikiran manusia yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pemikiran Politik Nurcholish Madjid tentang Islam dan Negara (Studi Dakwah Nurcholish Madjid) adalah kajian dakwah Nurcholish Madjid tentang pandangan politik Nurcholish Madjid tentang keterkaitan antara Islam dengan negara.

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran Nurcholish Madjid tentang keterkaitan antara Islam dengan negara.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penulisan sejarah tentang pemikiran politik Islam di Indonesia terutama penggalian terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dalam menjawab realita yang berkembang.
2. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan sekaligus bahan rujukan bagi civitas akademika Mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang berminat mendalami topik yang serupa.
1. Lihat Ahmad A. Sofyan & M. Raoychan Madjid, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam,* (Yogyakarta: Titian Press, 2003), h. 12. [↑](#footnote-ref-2)
2. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. V (Jakarta: UII Press, 1993), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-3)
3. Disadur dari Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Kita* dalam Bosco Carillo dan Dasrizal (Penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. (Jakarta: Leppenas, 1983), h. 4. [↑](#footnote-ref-4)
4. Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, Cet. VI (Jakarta Timur: Hujjah Press, 2009), h. Xlii-xliii. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. vii. [↑](#footnote-ref-6)
6. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 24. [↑](#footnote-ref-7)
7. Hafidz Abdurrahman, *Diskursus*  *Islam Politik dan Spiritual,* (Bogor: Al Azhar Press, 2010), h. 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Maulana, Achmad, dkk, *“Kamus Ilmiah Populer”,* Yogyakarta: Absolut, 2008. [↑](#footnote-ref-9)
9. Manzooruddin Ahmed dan Ziya Gokalp dalam Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Cita-Cita* *dan Masalah Kenegaraan,* Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1985), h.12. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tijani Abd Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*. (Jakarta: Gema Insani Press) h.Viii. [↑](#footnote-ref-11)